IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA

Oleh:

Nasip

NIM 1614101115

Jurusan Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan, dan data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis, dan faktor yuridis dengan menerapkan persyaratan yang ketat seperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi.

Kata Kunci: *Hak remisi, politik hukum, dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.*

IMPLEMENTATION ARTICLE 14 PARAGRAPH (1) CONSTITUTION NUMBER 12 OF 1995 ABAOUT INFRASTRUCTURE RELATING TO PRIVATE RIGHTS GETTING REMISITIO IN THE SINGARAJA CLASS II COMMUNITY INSTITUSION

By:

Nasip

NIM 1614101115

Departmen of Legal Studies

ABSTRACT

This study aims to (1) find out the legal politics applied to prisoners who are entangled in corruption cases so that they can be recommended to get remission right, and (2) know the consideration of Singaraja Class II B Panitentiary to recommended remission right. The type of research used is empirical legal research. The data was analyzed qualitativly descriptive. The result of this study indicate that the political law applied in Class II B Panitentiary in Singaraja for corruption case must meet the requirments between sociological factor, and juridical factors by applying strict requirements such as paying a fine, and subtituting money in accordance with court decisions. Whereas the conderation of Singaraja Class II B Panitentiary for recommending remission rihgt for prisoners of corruption case is divided into several stages, namely administration, guidance, assimilation, and integration.

Kwy Word: *Remission rights, legal politics, and consideration of Singaraja Class II B Penitentiary.*